

**PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM PEMERATAAN
PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM INDONESIA PINTAR
DI KECAMATAN SEMADAM**

Skripsi

ERIKA BR ARUAN

228510014



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26



**PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
ACEH TENGGARA DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN MELALUI
PROGRAM INDONESIA PINTAR DI KECAMATAN SEMADAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREAS**

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan standart, prinsip, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiarisme pada skripsi saya, saya bersedia menerima sanksi berupa pencaputan gelar akademik saya serta sanksi tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku



Medan, 11 April 2026



Erika Br Aruan

Erika Br Aruan
228510014

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ERIKA BR ARUAN
NPM : 228510014
JUDUL : PERANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA DALAM PEMERATAAN
PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM INDONESIA PINTAR DI
KECAMATAN SEMADAM



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Ketua Program Studi

Dr. Arief Lubis M.IP
Tanggal

AMIR KHUSRUDIN S.I.P. M.AP
Tanggal 19 Mei 2026

Tanggal Lulus 3 Maret 2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/26

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Br Aruan
NPM : 228510014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

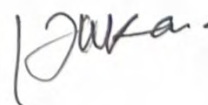
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalty Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Pemerataan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar di Kecamatan Semadam", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengeloladalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal : 11 Maret 2026

Yang menyatakan,



(Erika Br Aruan)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemerataan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Semadam. Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, serta masyarakat atau orang tua siswa penerima PIP. Hasil penelitian dengan menggunakan teori pitana & gayatri 2005 menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai fasilitator, motifator, dan dinamisator dalam pelaksanaan PIP. Peran tersebut diwujudkan melalui pendataan dan verifikasi penerima bantuan, sosialisasi kebijakan kepada sekolah dan masyarakat, serta pengawasan penyaluran dana agar tepat sasaran. Namun demikian, pelaksanaan PIP masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan akses geografis, dan ketidakakuratan data penerima. Secara umum, Program Indonesia Pintar di Kecamatan Semadam telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung pemerataan pendidikan, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam aspek koordinasi dan pendataan.

Kata Kunci: Dinas Pendidikan, Pemerataan Pendidikan, Program Indonesia Pintar,.

Abstract

This study aims to analyze the role of the Southeast Aceh Regency Education and Culture Office in equitable education through the Smart Indonesia Program (PIP) in Semadam District. The Smart Indonesia Program is a central government policy aimed at helping students from underprivileged families to maintain access to education and reduce dropout rates. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consisted of the Head of the Education and Culture Office, school principals, and the community or parents of PIP recipients. The results of the study, using the theory of Pitana & Gayatri 2005, show that the Education and Culture Office plays a role as a facilitator, motivator, and dynamic in the implementation of PIP. This role is realized through data collection and verification of aid recipients, policy socialization to schools and the community, and monitoring the distribution of funds to ensure they are on target. However, the implementation of PIP still faces several obstacles, such as delays in disbursement of funds, limited geographic access, and inaccurate recipient data. In general, the Smart Indonesia Program in Semadam District has made a positive contribution in supporting equal education, although it still requires improvements in the aspects of coordination and data collection.

Keywords: *Education Office, Educational Equity, Smart Indonesia Program.*

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di kota Medan pada Selasa, 29 Juli 2003 Pukul 20.45 WIB dari pasangan suami istri Ayahanda Elman Hasudungan Aruan dan Ibunda Rosdiana Siahaan. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersauda.

Pada tahun 2007 penulis Masuk Taman Kanak-Kanak di TK Harapan Mandiri dan Lulus pada Tahun 2009. Pada Tahun 2009 penulis diterima masuk sekolah di SD Negeri 067250 Medan dan Lulus pada Tahun 2015. Pada Tahun yang sama 2015 penulis diterima di SMP Swasta Pahlawan Nasional Medan dan Lulus pada tahun 2018 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 6 Medan dan Lulus pada Tahun 2021.

Pada tahun 2022 penulis melanjutkan jenjang pendidikan Strata 1 pada Prodi Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Adapun judul yang peneliti ajukan Adalah **“Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Pemerataan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar di Kecamatan Semadam”**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengalami banyak kesulitan seperti kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan dan sebagainya. Walau demikian rasa tanggung jawab dan kemauan keras penulis dapat melewati kesulitan tersebut.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat kepada pihak-pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini;

1. Kepada Tuhan Yesus atas segala kasih, penyertaan, hikmat, dan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa pertolongan dan penyertaan Tuhan, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Setiap proses yang dilalui penulis, baik suka maupun duka, merupakan bagian dari rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan penulis.

2. Secara khusus, penulis mempersembahkan karya ini kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Elman Hasudungan Aruan dan Ibunda Rosdiana Siahaan telah menjadi sumber semangat terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus. Terimakasih untuk pengorbanan, kerja keras, serta dukungan moral dan materi yang telah diberikan selama ini kepada penulis. Penulis tidak akan bisa berberdiri tanpa kalian Kitting dan Trax, I love you so much.
3. Bapak Dr. Yurial Arif Lubis, S.Sos, M.IP selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Amas Mashudin, S.IP, M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Beby Mashito Batu Bara, S.sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan arahan dan serta kesabaran kepada penulis disaat penulis menghilang beberapa waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada abangda M. Hamdani Santoso, S.Kom selaku IT Program Studi Ilmu Pemerintahan yang membantu penulis dan selalu sabar menghadapi penulis dalam penyusunan berkas-berkas skripsi dari awal sampai saat ini dan menjadi tempat mengeluh penulis dan teman-teman penulis terimakasih telah menjadi peran abang kandung di perkuliahan.

7. Bapak Tawardi, S.Pd Selaku Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, Ibu Sita Rasina, S.Pd Selaku Kepala Sekolah SD N. 1 Semadam Kabupaten Aceh Tenggara serta Masyarakat yang berkenan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi tepat waktu.
8. Kepada abangda tersayang Rio Dola Aruan yang memberi semangat serta dukungan materi dan mengikuti kemauan penulis selama penyusunan skripsi sampai di titik ini. Semoga abangda diberi Kesehatan, Kebahagiaan serta Rezekinya yang bertambah agar lebih sering memberi kepada penulis dan kepada Daud Rajani Aruan adik penulis terimakasih telah yang menjadi supir pribadi penulis selama perkuliahan.
9. Terimakasih kepada teman-teman di Grup “HANYA GRUP BIASA” yang mendukung penulis dalam perkuliahan dari semester 1 sampai sekarang dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk teman penulis, Bulan Suci Hasibuan (228510005), Aqila Adwa Ulaya (228510020), dan Putri Dera Ananda (228510003) yang telah mendukung serta menemani penulis sampai begadang, kopi kenangan jadi saksi bisu pembuatan skripsi ini dari awal penulisan skripsi sampai selesai, terimakasih telah berteman tanpa merasa tersaingi senang bertemu dan berteman dengan kalian, love you guys.
11. Terimakasih kepada dosen-dosen program studi ilmu pemerintahan yang telah memberikan pembelajaran berharga kepada penulis dari

September tahun 2022 sehingga sekarang penulis bisa sampai di tahap ini.

12. Terimakasih kepada sosok telah menjadi perempuan yang kuat meski harus menangis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih telah berjuang sampai titik ini dan mendapatkan gelar S.I.P diujung nama yang singkat ini yaitu Erika br Aruan. Terus semangat sampai semua keinginanmu tercapai walaupun banyak orang yang ragu, (Ulangan 31:6 Menguatkan Hati untuk tidak takut karena tuhan selalu menyertai).



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
Abstract	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan penelitian.....	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Peran.....	10
2.2 Program Indonesia Pintar (PIP)	12
2.2.1 Peserta Didik Penerima Dana PIP	14
2.3 Kebudayaan.....	15
2.4 Pemerataan Pendidikan	17
2.5 Penelitian Terdahulu.....	22
2.6 Kerangka Berfikir.....	24
BAB 3	26
METODELOGI PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu penelitian	27
3.3 Informan Peneliti.....	28

3.4	Teknik pengumpulan data	29
3.5	Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		33
4.1.	Hasil	33
4.1.1	Kondisi Geografis	33
Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.....		34
4.1.2	Keadaan Penduduk.....	34
4.1.4	Pendidikan.....	34
4.1.5	Struktur Organisasi.....	35
Gambar 2		37
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara		37
4.2	Pembahasan.....	37
4.2.1	Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai teori Pitana & Gayatri 2005	37
4.2.1.1	Fasilitator.....	41
4.2.1.2	Motifator	44
4.2.1.3	Dinamisator	48
4.2.2	Hambatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara	51
4.2.2.1	Fasilitator	54
4.2.2.2	Motifator	56
4.2.2.3	Dinamisator	58
BAB V.....		62
KESIMPULAN DAN SARAN.....		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran 1 Surat Pengantar Riset.....	68
Lampiran 2 Surat Selesai	70
Lampiran 3 Wawancara Peneliti	72
Lampiran 4 Dokumentasi.....	75



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Penerimaan PIP di Kecamatan Sedamam (2022-2924)	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2. 2 Keranga Berfikir	25
Tabel 3. 1 Informan penelitian	29



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu negara untuk unggul dalam persaingan global. Pendidikan dianggap paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan nasional. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas dan berkarakter merupakan prasyarat terbentuknya peradaban yang tinggi. Sebaliknya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah akan menghasilkan peradaban yang kurang baik pula. Berikut adalah beberapa program yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah guna mencapai pemerataan pendidikan yang optimal.

Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Upaya seperti pembangunan unit sekolah baru, perbaikan dan pemeliharaan bangunan sekolah, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan lapangan olahraga menjadi hal penting untuk menjamin pemerataan akses pendidikan. Selain itu, peningkatan akses transportasi menuju sekolah juga sangat dibutuhkan. Dengan menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau, pemerintah dapat membantu siswa di daerah terpencil agar tidak terkendala oleh jarak dalam menempuh pendidikan.

Selain membangun infrastruktur dan meningkatkan akses transportasi, pemerintah juga perlu merancang program bantuan keuangan dan beasiswa khusus untuk keluarga kurang mampu, baik di desa maupun di kota. Bantuan ini bisa berupa beasiswa penuh maupun parsial, serta dukungan biaya pembelian buku dan

kebutuhan sekolah lainnya. Dengan langkah ini, diharapkan kendala ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengenyam pendidikan. Selain itu, pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal sangat penting agar proses belajar menjadi lebih relevan dan menarik bagi siswa. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat setempat dalam perumusan kurikulum dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Selanjutnya, peningkatan kualitas pendidikan harus difokuskan pada pengembangan kompetensi guru melalui program pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan, terutama bagi guru yang bertugas di daerah terpencil. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam upaya pemerataan pendidikan. Penyediaan fasilitas internet dan perangkat komputer di wilayah-wilayah sulit dijangkau serta pengembangan platform pembelajaran daring dapat membuka akses siswa terhadap berbagai sumber belajar yang lebih luas. Tidak kalah penting, keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat sekitar dalam proses pendidikan akan memperkuat sinergi antara sekolah dan lingkungan. Melalui kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan program partisipatif lainnya, dapat tercipta suasana belajar yang kondusif dan mendukung keberhasilan pendidikan pada semua jenjang.

Salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat membantu siswa dalam bidang pendidikan adalah Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pemberian bantuan pendidikan secara tunai kepada anak sekolah usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu dan merupakan bagian dari penyempurnaan Bantuan

Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka melaksanakan Kebijakan Presiden Nomor 7 tahun 2014 tentang guna membentuk dan membangun keluarga produktif. Program Indonesia Pintar (PIP) diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan lembaga pendidikan nonformal lainnya atau sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Agusman, 2019),

Program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diluncurkan untuk mengatasi masalah pendidikan sekolah yang terjadi dimana masih banyak ditemukan kasus siswa dengan usia dini putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya. PIP sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin, karena siswa-siswi yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah pada usia dini. Hal ini disebabkan oleh keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga kebanyakan siswa memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk membantu keluarga dengan bekerja. Atas dasar masalah ini, pemerintah mengambil langkah upaya pemecahan masalah agar siswa yang berasal dari keluarga miskin dapat menyelesaikan sekolahnya dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Agusman, 2019).

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah : efisiensi, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan; efektif yaitu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan; Transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP; akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan; kepatutan yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; manfaat yaitu pelaksanaan program /kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional (Karningsih, 2021).

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang tertuang dalam SDG's atau Tingkat Pembangunan Berkelanjutan (TPB), selain itu dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 7 prioritas pembangunan, Kemendikbud Ristek memberikan dukungan agenda pembangunan dalam Permendikbud Ristek Nomor 13 tahun 2022 yaitu (1). Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (2). Revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan; dan (3). Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik. Arah kebijakan dan strategi nasional disusun untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, meningkatkan produktivitas daya saing, revolusi mental dan pembinaan ideology pancasila untuk memperkokoh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas, dan reformasi birokrasi dan tata kelola (ombudsman.go.id, 2024).

Pada nyatanya berbagai masalah tentang pemerataan pendidikan masih terus bergulir, diantaranya masih minimnya penyebaran sarana prasarana pendidikan, akses internet belum merata, kualitas dan kuantitas SDM tidak sebanding. Salah satu aspek yang dapat dilihat adalah kualitas IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan salah satu indikator adalah pengetahuan, walaupun IPM Indonesia

meningkat 0,84% menjadi sebesar 74,39 nyatanya Provinsi Papua masih berada pada urutan terakhir dengan nilai IPM 62,25. Padahal setiap anak usia sekolah sudah dijamin didalam Undang-undang untuk dapat mengakses pendidikan seperti dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Pada tahun 2023, proporsi pendidikan tertinggi penduduk usia 15 tahun ke atas hanya pada tingkat pendidikan menengah sebanyak <50% (SMP dan SMA) (ombudsman.go.id, 2024).

Program Indonesia Pintar disalurkan dalam bentuk bantuan tunai kepada siswa dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yaitu SD, SMP, hingga SMA/SMK, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Siswa penerima bantuan umumnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau merupakan bagian dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dana yang diberikan bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan, seperti perlengkapan sekolah, ongkos transportasi ke sekolah, serta berbagai keperluan belajar lainnya.

Di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Tenggara, PIP menjadi salah satu program yang sangat penting dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan angka putus sekolah, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman seperti Kecamatan Semadam. Kabupaten ini memiliki tantangan geografis serta tingkat ekonomi masyarakat yang sebagian besar tergolong menengah ke bawah, yang berpotensi menghambat kelangsungan pendidikan anak-anak.

Melihat pentingnya program ini dalam mendorong pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka perlu dilakukan kajian

lebih lanjut mengenai implementasi Program Indonesia Pintar di Kabupaten Aceh Tenggara, khususnya untuk mengetahui sejauh mana program ini telah menjangkau siswa-siswa yang membutuhkan dan bagaimana efektivitasnya dalam mengurangi angka putus sekolah di daerah tersebut.

Menurut hasil peneliti terdahulu oleh (M. Ega Zamaludin DKK), 3 sekolah dasar di Kecamatan Cikole. peneliti menunjukkan bahwa implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tiga sekolah dasar tersebut berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Program KIP ditujukan untuk anak usia 6-12 tahun dari keluarga miskin, rentan miskin, dan keluarga penerima program sosial lainnya.

Melalui penelitian ini, penulis ingin menggali lebih dalam bagaimana peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP), Dengan demikian, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu mendorong pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) yang lebih bersih, adil, dan tepat sasaran.

Di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, terutama di Kecamatan Semadam, program ini berperan penting dalam menjaga kesinambungan pendidikan, mengingat masih banyak keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan dan memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tenggara dan portal PIP Kemendikbud, berikut adalah data penerima PIP per sekolah dan per tahun di Kecamatan Semadam:

Tabel 1. 1

Data Penerimaan PIP di Kecamatan Sedamam (2022-2024)

Tingkat SD

No	Nama Sekolah/Yayasan	Disalurkan	Pemberian	Pemberian Dari Aktivasi Nominasi	Pemberian Relaksasi	Tahun
1.	SD NEGERI 1 SEMADAM	77	1	48	28	2022
		107	59	8	40	2023
		66	57	3	6	2024
2.	SD NEGERI 2 SEMADAM	67	7	22	38	2022
		143	57	20	66	2023
		154	126	2	26	2024
3.	SD NEGERI 3 SEMADAM	133	11	95	27	2022
		116	89	7	20	2023
		74	58	-	16	2024
4.	SD NEGERI 4 SEMADAM	56	7	37	12	2022
		45	34	1	10	2023
		2	-	-	2	2024
5.	SD LAWE KINGA	115	15	95	5	2022
		138	88	12	38	2023
		119	91	20	8	2024
6.	SD NEGERI LAWE SERKE	89	1	88	-	2022
		107	64	8	35	2023
		107	86	9	12	2024
7.	SD NEGERI SEMADAM ASAL	60	6	53	1	2022
		75	48	10	17	2023
		81	59	9	13	2024
8.	SD SWASTA HKBP LAWE BERINGIN	45	2	33	10	2022
		60	31	7	22	2023
		43	38	-	5	2024
9.	SD NEGERI SIMPANG SEMADAM	58	2	33	10	2022
		113	31	7	22	2023
		101	38	-	5	2024
10.	SD SWASTA IT DARUL MAKMUR ALHAFIZ	98	2	17	79	2023
		136	92	4	40	2024
		110	57	11	42	2024
		122	63	35	24	2022
		25	10	14	1	2023
		19	17	1	1	2024

Sumber: https://pip.kemendikdasmen.go.id/penyaluran/jenjang_sekolah

Menurut data diatas Kecamatan Semadam, banyak siswa dari keluarga kurang mampu di wilayah tersebut yang terbantu secara signifikan melalui PIP. Dengan bantuan ini, anak-anak yang sebelumnya berisiko putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya. Namun demikian, pelaksanaan PIP di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterlambatan pencairan dana, kurangnya sosialisasi, dan ketidakakuratan data penerima.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemerataan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Semadam?
2. Apa saja hambatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemerataan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Semadam?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemerataan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Semadam.
2. Untuk mengetahui hambatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemerataan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Semadam.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam:

Menambah referensi ilmiah terkait studi kebijakan publik dan etika pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan khusus nya Di Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara melalui program bantuan langsung seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Serta memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tentang etika birokrasi, pengawasan dana pendidikan, dan efektivitas program sosial berbasis bantuan tunai langsung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan pendidikan agar lebih akuntabel dan transparan dalam penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma -norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dengan masyarakat, peranan peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan (Soekanto, 2012:238).

Menurut Mulyasa (2009), peran menggambarkan fungsi atau tanggung jawab tertentu yang diambil seseorang dalam struktur sosial, baik konteks keluarga, Masyarakat, ,maupun institusi Pendidikan. Dalam kebijakan pemerataan Pendidikan, peran pemerintah sangat penting sebagai pembuat kebijakan, penyedia fasilitas pendidikan, dan pengawasan Pendidikan agar tercipta keadilan akses bagi seluruh warga negara.

Menurut Sedarmayanti (2004:33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula Tingkat kejelasan peranan seseorang.

Menurut Soekanto (2009:243), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Mengenai pengertian peran

maka akan ditemukan bermacam-macam pendapat yang memberikan rumusan-rumusan dan berbagai sudut pandang yang sangat bervariasi.

Peranan menurut teori peran dari Pitana & Gayatri (2005:95).

1. *Fasilitator*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan menyediakan sarana dan mendukung kelancaran program PIP, mulai dari pendataan hingga pencairan bantuan, agar tepat sasaran dan menjangkau siswa yang membutuhkan.
2. *Motifator*, Dinas Pendidikan dan kebudayaan memberikan dorongan dan edukasi kepada sekolah, orang tua, dan siswa agar memanfaatkan bantuan PIP untuk keberlanjutan pendidikan dan peningkatan semangat belajar.
3. *Dinamisator*, Dinas Pendidikan dan kebudayaan menjadi penggerak perubahan dengan melakukan pembinaan, evaluasi, dan inovasi kebijakan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan secara adil dan berkelanjutan

Senada dengan itu, Tilaar (2003) menjelaskan bahwa peran negara dalam pendidikan tidak hanya sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai fasilitator dan pengatur agar setiap warga negara, terutama yang berada di daerah tertinggal, mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pendidikan.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan arah kepada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan

- c. Dapat mempersatukan suatu kelompok atau Masyarakat
- d. Dapat menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol sehingga dapat melestarikan

Dalam penelitian ini teori implementasi menurut George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu:

- Komunikasi, bagaimana kebijakan disampaikan kepada pelaksana Masyarakat.
- Sumber daya, mencakup dana, sarana prasarana, serta SDM.
- Disposisi Atau sikap pelaksana, yaitu komitmen dan respon aparat dalam menjalankan kebijakan.
- Struktur birokrasi, yakni mekanisme kerja, SOP, serta koordinasi antar Lembaga.

Teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan Tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu maupun kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dalam Keputusan kebijakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta kecenderungan pelaksana.

2.2 Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Pemerintah telah berupaya keras

menggalakkan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan, yakni melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) (Bella & Pebria, 2019).

Program Indonesia Pintar antara lain yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) lanjutan dan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Melalui penerbitan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai identitas siswa berhak mendapatkan manfaat program dan yang akan diterbitkan secara bertahap, program bantuan tunai pendidikan ini akan diberikan secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua jenjang pendidikan (Ahmad, 2013; Karningsih, 2021; Sari, Musdalifah, & Asfar, 2021).

Kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan (Bella & Pebria, 2019).

Dasar Pemerataan Pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 47/2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun, Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin

terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.” Dan Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan. Pendidikan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing (Palar, 2018).

Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah : efisiensi, Yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggung jawabkan; efektif yaitu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan; Transparan yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP; akuntabel yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan; kepatutan yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional; manfaat yaitu pelaksanaan program /kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional (Karningsih, 2021).

2.2.1 Peserta Didik Penerima Dana PIP

Sofiana Nurjanah, Koordinator Pokja PIP di Puslapdik menjawab pertanyaan tersebut pada Webinar Sosialisasi Program Indonesia Pintar Dikdasmen 2021, beberapa waktu lalu. Menurut Sofiana, segala hal ihwal PIP sudah tercantum di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang lantas petunjuk pelaksanaannya ditegaskan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 7 Tahun 2021. Dijelaskannya, ada dua kategori peserta didik

yang berhak menerima PIP, yakni, pertama, siswa yang berasal dari keluarga yang tercatat di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. “Di DTKS itu ada 10 kategori atau desil dan yang berhak menerima PIP adalah pada desil 1-4, yakni sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin, “kata Sofiana. (Puslapdik, 2021).

2.3 Kebudayaan

Dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya menyentuh aspek administratif dan teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kebudayaan masyarakat setempat. Kebudayaan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pendidikan, nilai-nilai yang dijunjung, serta partisipasi mereka dalam mendukung program-program pemerintah, termasuk PIP.

Menurut Koentjaraningrat (2009:180), kebudayaan adalah “keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”. Dalam konteks pendidikan, sistem nilai budaya yang ada di masyarakat akan sangat mempengaruhi respons mereka terhadap program seperti PIP. Misalnya, di daerah yang mengutamakan pendidikan sebagai nilai luhur, program bantuan pendidikan akan lebih cepat diterima dan dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (2000:113) menyatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya mencerminkan keterampilan dan teknologi, rasa mencerminkan sistem nilai, sedangkan cipta mencerminkan daya pikir masyarakat. Maka dalam

konteks pelaksanaan PIP, kebudayaan lokal dapat tercermin dari bagaimana masyarakat menilai pentingnya pendidikan, seberapa besar keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran anak-anak, dan bagaimana sikap mereka terhadap bantuan pemerintah.

Lebih lanjut, Herskovits (dalam Parsudi Suparlan, 2001) menyebut bahwa kebudayaan adalah bagian dari lingkungan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan juga dapat dibentuk dan diubah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab tidak hanya mendistribusikan bantuan PIP, tetapi juga melakukan pendekatan budaya, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar program berjalan dengan nilai-nilai lokal yang positif.

Dengan demikian, pemahaman tentang kebudayaan lokal di SD Negeri 1 Semadam menjadi penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu mempertimbangkan konteks budaya masyarakat sekitar, agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mendapat dukungan kultural yang kuat dari lingkungan sosial.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Beberapa tugas dari Kemendikbud adalah menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan; dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan. Kedudukan, tugas dan fungsi dari kementerian dalam pemerintahan senantiasa mengalami perubahan mengikuti keputusan Presiden. Setiap perubahan detail teknis dari kementerian secara legal tertuang di dalam Peraturan Presiden (Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).

2.4 Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global.

Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang

bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi” (Ivo Basri K, 2017).

Pemerataan pendidikan adalah upaya untuk menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, agama, suku, atau daerah tempat tinggal. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan. Salah satu tantangan utama dalam pemerataan pendidikan adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagian besar sekolah berkualitas tinggi terletak di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan kualitas pendidikan antara anak-anak di perkotaan dan pedesaan semakin melebar. (Erika, 2023).

Teori keadilan distributive Jhon Rawls menyatakan bahwa pemerataan Pendidikan harus menjamin akses yang sama bagi semua orang, terutama bagi kelompok paling lemah, melalui prinsip kebebasan dasar dan prinsip perbedaan yang menekankan manfaat terbesar bagi kelompok yang kurang beruntung (Nurhasan, Halil, & Aprilia, 2024).

Teori pemerataan Aktif dan Pasif Coleman yang dikutip oleh Ace Suryadi Menekankan bahwa pemerataan pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerataan pasif yang hanya memberikan kesempatan untuk masuk sekolah, dan

pemerataan aktif yang berupa memberikan peluang yang sama agar setiap peserta didik memperoleh hasil belajar yang optimal (Suryadi & Tilaar, 2011).

Konsep pemerataan Schiefelbein dan Farrell menjelaskan bahwa sistem pemerataan Pendidikan harus memperhatikan dua aspek, yaitu pemerataan kesempatan masuk sekolah (*equality of access*) dan pemerataan kesempatan bertahan di sekolah (*equality of survival*), sehingga peserta didik tidak hanya mendapat akses awal tetapi juga mampu menyelesaikan pendidikannya (Suryadi, 2011).

Selain itu, kesenjangan juga terjadi dalam hal aksesibilitas pendidikan. Banyak anak di daerah terpencil atau terisolasi sulit untuk mengakses sekolah karena jarak yang jauh atau infrastruktur yang tidak memadai. Kondisi ini membuat mereka sulit mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga berpotensi menjadi generasi yang terpinggirkan dan sulit berkembang. Selain kesenjangan geografis, pemerataan pendidikan juga terkendala oleh faktor ekonomi.

Banyak keluarga miskin atau berpenghasilan rendah yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Beban biaya pendidikan yang tinggi, seperti biaya sekolah, buku, seragam, dan transportasi, menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin sering kali terpaksa putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. (Erika, 2023).

Untuk menjawab tantangan pemerataan pendidikan, pemerintah perlu memperkuat dukungan anggaran bagi sektor pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil. Dengan dukungan dana yang memadai,

pemerintah dapat membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, serta laboratorium. Selain itu, bantuan finansial juga perlu diberikan kepada keluarga miskin agar anak-anak mereka tetap memiliki akses terhadap pendidikan, tanpa terhambat oleh keterbatasan ekonomi.

Di sisi lain, peningkatan kualitas guru di daerah pedesaan juga menjadi hal penting. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas para pendidik, serta mendorong kebijakan rotasi guru dari kota ke desa guna mengatasi kekurangan tenaga pengajar. Selain peran pemerintah, keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Masyarakat dapat membantu menjaga dan mengembangkan fasilitas pendidikan, serta memberikan semangat dan dukungan moral kepada anak-anak agar terus semangat dalam menempuh pendidikan.

Rohman, (2009:245) menyebutkan bahwa masalah pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya masyarakat menengah keatas yang mendapatkan pendidikan layak, masyarakat miskin pun berhak mendapatkannya, tidak seperti kenyataan yang terjadi di Indonesia yaitu pembangunan pendidikan pada masyarakat menengah ke atas lebih memadai atau layak dibandingkan masyarakat miskin. Kasus ini membuktikan bahwa pemerintah belum begitu tanggap dalam pemerataan pendidikan.

Pemerataan pendidikan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian terutama di negara-negara berkembang. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan,

sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama. Tuntutan atas pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas. Perluasan dan pemerataan pendidikan memberikan tuntutan pada peningkatan pemerataan memperoleh pendidikan bagi siswa lulusan SD/MI SMP/MTs, SMA/MA. Pemerataan pendidikan berkaitan dengan penanggulanga kemiskinan.

Secara konsepsional konsep pemerataan yakni pendidikan: pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya.

Pemerataan pendidikan memiliki dua elemen kunci yakni membekali individu dengan pengetahuan yang memungkinkan mereka mengambil bagian dalam segala aspek kehidupan serta memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada setiap individu (Azizah Arifinna Safarah, 2018).

Disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan mempunyai makna di mana tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah

menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi akademik yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

2.5 Penelitian Terdahulu

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menginisiasi Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini dirancang agar siswa yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani oleh kendala biaya.

Meski demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan PIP masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan dan ketimpangan akses di sejumlah daerah. Oleh karena itu, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi krusial sebagai pelaksana di tingkat daerah yang bertugas memastikan program berjalan efektif dan merata. Dinas ini memiliki tanggung jawab dalam hal pendataan penerima manfaat, penyuluhan kepada masyarakat, kerja sama dengan pihak sekolah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana kontribusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung pemerataan pendidikan melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Sebagai landasan kajian, berikut dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini.

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Metode	Perbedaan dan Persamaan
1.	Roosmaini Skripsi, 2019	Peranan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah	Kualitatif	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu peneliti focus dengan meningkatkan mutu Pendidikan sekolah dasar sedangkan peneliti fokus pada peranan dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam program Indonesia pintar, persamaan peneliti terdahulu dan peneliti yaitu meningkatkan pelaksanaan dinas Pendidikan dan kebudayaan.
2.	Ainun Nisa Kamila, Yaqub Cikusin, Hirshi Anadza, Jurnal, 2022	Efektivitas Sosialisasi Oleh Dinas Pendidikan Dalam Pemerataan Kebijakan Program Indonesia Pintar (Pip) Di Sekolah Dasar Kabupaten Bangkalan	kualitatif-deskriptif	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu peneliti focus pada kebijakan program Indonesia pintar sedangkan peneliti fokus pada peranan dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam program Indonesia pintar, persamaan peneliti terdahulu dan peneliti yaitu ingin melihat meratanya penerima program Indonesia pintar di kalangan masyarakat.
3.	M. Ega Zamaludin, Dine Meigawati, Rizki Hegia Sampurna, Jurnal.	Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri	Kualitatif-deskriptif	Perbedaannya peneliti terdahulu dan peneliti yaitu fokus pada implemntasi kartu Indonesia pintar sedangkan peneliti fokus pada peranan dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam pemerataan program Indonesia pintar.

				Persamaan peneliti dan peneliti terdahulu dan peneliti yaitu untuk mengetahui pemerataan program Indonesia pintar berjalan sesuai ketentuan.
4.	Putri Tania Saskia Desky , Bustami Usman, Helmi. Jurnal	Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Kuantitatif	Perbedaannya peneliti sebelumnya fokus pada standar kompetensi lulusan dan standar sarana dan prasarana sedangkan peneliti berfokus pada pemerataan program Indonesia pintar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Persamaannya peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu Lokasi yang sama.
5.	Irmaya Rinda Puspita, H. Muhammad Noor, Endang Erawan. Jurnal	Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Di Kota Samarinda	Deskriptif Kualitatif	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yaitu peneliti terdahulu fokus pada kualitas guru, sedangkan peneliti fokus pada peranan dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam program Indonesia pintar, Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti yaitu memiliki indikator peranan yang sama.

2.6 Kerangka Berfikir

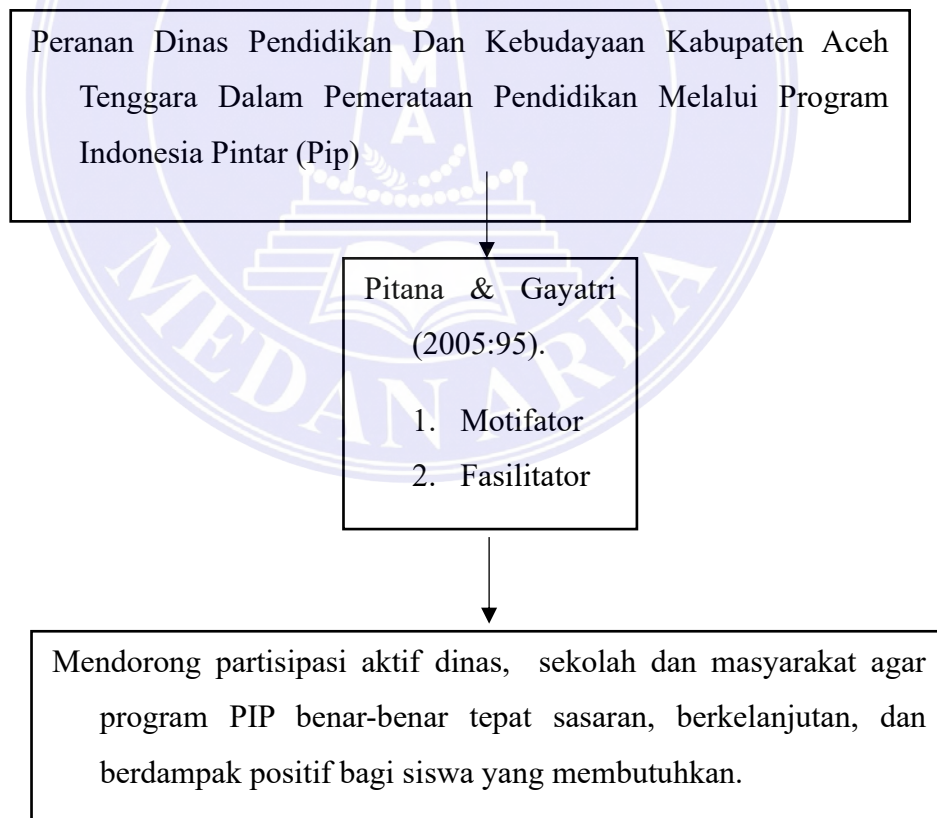
Dalam konteks penelitian ini, kerangka berpikir digunakan untuk menggambarkan hubungan antara peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerataan pendidikan melalui program PIP. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar untuk menjamin akses pendidikan yang merata, khususnya di SD Negeri 1 Semadam. Peran tersebut diikat oleh norma-

norma berupa kebijakan dan prosedur pelaksanaan PIP. Wujud dari peran tersebut akan tampak dalam tindakan nyata, seperti pendataan siswa penerima manfaat, koordinasi dengan sekolah, dan monitoring pelaksanaan program.

Selanjutnya, keberhasilan peran dinas dapat dievaluasi dari dampak nyata yang dirasakan oleh sekolah dan siswa, seperti meningkatnya partisipasi sekolah dan berkurangnya angka putus sekolah. Jika peran tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka konsekuensi berupa sanksi administratif atau penilaian negatif dari masyarakat dapat terjadi.

Tabel 2. 2

Kerangka Berfikir



BAB 3

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam suatu fenomena sosial berdasarkan data-data yang bersifat naratif. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemerataan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Menurut Moleong (2019: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sementara itu, Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2019: 4), mengatakan penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena data yang diperoleh berupa kata-kata dan perilaku, maka peneliti memakai jenis penelitian yang memakai penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2019: 11), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan yang menjadi permasalahan atau fakta, fenomena, variabel dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peranan Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemerataan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi merupakan objek yang diteliti, dimana lokasi penelitian merupakan hal terpenting dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan bulan Juli 2025.

No.	Kegiatan	Bulan																											
		Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025				Agustus 2025				Oktober 2025				November 2025				Januari 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																												
2.	Penyusunan Proposal																												
3.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal																												
4.	Seminar Proposal																												
5.	Revisi Proposal																												
6.	Observasi lapangan dan wawancara																												
7.	Penyusunan Bab IV-V																												
8.	Seminar Hasil																												
9.	Bimbingan dan Perbaikan																												
10.	Pengajuan Berkas Meja Hijau																												
11.	Sidang Skripsi																												

3.3 Informan Peneliti

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan informan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Menurut Sugiyono (2019:133), purposive sampling adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya mereka yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, guru, serta orang tua siswa penerima bantuan PIP.

Menurut Bagong (2005:72), informan meliputi jenis-jenis sebagai berikut:

1. Informan kunci, adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan memiliki segala macam informasi penting yang dibutuhkan untuk penelitian.
2. Informan utama adalah orang-orang yang secara langsung terkait dengan interaksi sosial yang dimaksud.
3. Informan tambahan adalah seseorang yang dapat memberikan data meskipun ia tidak langsung terlibat dengan komunikasi atau interaksi sosial yang diteliti.

Tabel 3. 1**Informan penelitian**

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara	1	Informan Kunci (Key Informants)
2.	Kepala Sekolah Sd Negeri 1 Semadam	1	Informan Utama
3.	Masyarakat yang menerima Program Indonesia Pintar (PIP)	2	Informan tambahan
Jumlah			4

3.4 Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, guna memperoleh informasi yang mendalam dari informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Teknik-teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk menggali data primer dari informan kunci seperti pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, guru, orang tua, serta siswa penerima manfaat PIP. Menurut Lexy J. Moleong (2017:186), “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”

Dalam melakukan sebuah wawancara terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu:

- 1) Menyiapkan draft atau pedoman pertanyaan untuk wawancara, agar pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber sesuai dengan tujuan diadakannya wawancara tersebut.
 - 2) Menentukan siapa yang akan menjadi narasumber wawancara, tentu saja seseorang yang memiliki keterkaitan penting dengan penelitian.
 - 3) Menentukan lokasi dan waktu wawancara.
 - 4) Melakukan proses wawancara dengan baik.
 - 5) Dokumentasi.
 - 6) Memastikan hasil wawancara sesuai dengan informasi yang dibutuhkan penulis.
 - 7) Merekap hasil wawancara.
2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, seperti sekolah penerima PIP atau kantor Dinas Pendidikan, untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan program berlangsung. Observasi akan dilakukan di SD Negeri 1 Semadam untuk melihat kondisi nyata pelaksanaan program PIP, keterlibatan sekolah, serta partisipasi siswa dan orang tua.. Menurut Sugiyono (2019:146), “observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.”

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen yang relevan, seperti daftar penerima PIP, juknis program, laporan kegiatan, serta arsip data dari Dinas Pendidikan atau sekolah. Menurut Arikunto (2013:274), “dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya.”

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Teknik ini digunakan untuk mengolah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemerataan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri 1 Semadam.

Menurut Miles dan Huberman (1994:10), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu:

1. **Reduksi Data (Data Reduction)** Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Reduksi data bertujuan untuk memilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan.
2. **Penyajian Data (Data Display)** Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, matriks, atau tabel agar memudahkan peneliti dalam memahami dan menarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data yang baik akan membantu peneliti melihat pola hubungan antara informasi yang dikumpulkan.
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)**

Setelah data direduksi dan disajikan, peneliti mulai menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi melalui pencocokan dengan data lain untuk memastikan validitasnya.

Kesimpulan bisa bersifat deskriptif atau interpretatif tergantung pada kedalaman analisis yang dilakukan. Selain itu, menurut Moleong (2017:248), “analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, serta mencari dan menemukan pola. Dalam konteks penelitian ini, teknik analisis data dilakukan sejak proses pengumpulan data dimulai hingga seluruh data terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab fokus penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pemerataan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Semadam, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan memberikan pendampingan, sosialisasi juknis, serta memverifikasi data penerima bantuan agar tepat sasaran. Sebagai motifator, Dinas mendorong sekolah, orang tua, dan siswa agar memanfaatkan dana PIP untuk kebutuhan pendidikan sehingga dapat meningkatkan semangat belajar dan kehadiran siswa di sekolah. Sementara sebagai dinamisator, Dinas aktif menggerakkan sekolah melalui koordinasi, pembaruan data penerima setiap tahun, serta pengawasan agar program tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan geografis.
2. Hambatan utama yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi ketidaktepatan dan keterlambatan pembaruan data dari sekolah, keterbatasan sumber daya manusia (operator Dapodik), kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kendala dalam proses pencairan dana di bank yang memerlukan jarak dan biaya tambahan bagi masyarakat. Meskipun demikian, Dinas tetap berupaya mengatasi

hambatan tersebut melalui koordinasi dengan sekolah, pemanfaatan teknologi komunikasi, serta monitoring secara berkala.

5.2 Saran

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara disarankan untuk terus memperkuat perannya sebagai fasilitator, motifator, dan dinamisator dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Peran fasilitator dapat ditingkatkan melalui pendampingan teknis yang lebih intensif kepada sekolah, khususnya dalam proses pendataan dan validasi data siswa. Sebagai motifator, Dinas perlu terus mendorong sekolah, orang tua, dan siswa agar memanfaatkan dana PIP secara optimal untuk kebutuhan pendidikan. Sementara itu, sebagai dinamisator, Dinas diharapkan terus menjaga koordinasi aktif dengan sekolah agar pembaruan data dan pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan merata di seluruh wilayah Kecamatan Semadam.
2. Sebagai solusi jangka panjang, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Dinas Pendidikan, sekolah, pemerintah desa, dan masyarakat. Pemerintah desa dapat dilibatkan dalam proses verifikasi data ekonomi keluarga, sementara masyarakat perlu terus diberikan pemahaman mengenai pentingnya pembaruan data dan penggunaan dana PIP sesuai peruntukannya. Dengan kerja sama yang baik antar pihak, Program Indonesia Pintar diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar mendukung pemerataan pendidikan di Kecamatan Semadam.

Kemudian untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan Lokasi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kombinasi metode untuk memperkuat temuan serta meneliti aspek efektivitas penggunaan dana pip maupun pengaruhnya terhadap keberlanjutan Pendidikan. Peneliti lebih lanjut dapat menggali peran Lembaga pengawas dan faktor sosial-ekonomi penerima secara mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- (Azizah Arifinna Safarah, 2018) Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia, 206-213
- Badan Pusat Statistik Aceh Tenggara. (2023). Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Angka 2023.
- Bella, ghia dimmera, & Pebria, dheni purnasari. (2019). permasalahan dan solusi program indonesia pintar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di kabupaten bengkayang. *Kybernan: Jurnal Studi Manajemen*, 2(1), 307–314. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v2i1.469>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohman, A., & Lamsuri, M. (2009). Memahami pendidikan & ilmu pendidikan. LaksBang Mediatama bekerja sama dengan Kantor Advokat" Hufon & Hans Simaela". 245
- Selo Soemardjan & Soelaeman Soemardi. (2000). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. (2001). *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- (Nurhasan, H., Halil, H., & Aprilia, S. W., 2024). Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia perspektif Jhon Rawls. *GAHWA*, 2(2), 49-61.

(Van Meter, Donald S., & Van Horn, Carl E , 1975). The policy Implementation Process: A Conceptual Framework."Administration And Society, 6(4)

JURNAL

Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Publik*, 105-113.

Jurnal Administrasi Publik, 4. (-1. (t.thn.).

Nurhayati, A., & Septarina, L. (2020). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Meningkatkan Partisipasi Sekolah. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 134–144.

Karningsih, K. (2021). Implementasi Program Indonesia Pintar di Era Pandemi Covid-19. *Public Service and Governance Journal*, 2(02), 41–49.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/view/2276%0Ahttp://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/psgj/article/download/2276/1515>

Ahmad., (2013) Kinerja Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar (Survei Pada 6 Provinsi di Indonesia). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Ivo Basri K, (2017). Pemerataan Pendidikan Dasar Berbasis Lingkungan Hidup, (175-176).

Soekanto, Soejono. 2012. Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sari, M., Musdalifah, S., & Asfar, E. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone. *Jurnal Mappesona*, (1), 43–53.

Erika, (2023). pemerataan-akses-pendidikan-berkualitas-di-Indonesia

Palar, N. R. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerataan Mutu Pendidikan Di Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(64), 43–48.

(Suryadi, A., & Tilaar, H.A.R., 2011). Analisis Kebijakan Pendidikan: suatu pengantar. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

(Edwards III, George C. (1980)). Implementing Public Policy. Washinton D.C. Congressional Quarterly Press.

WEBSITE

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pemerataan-pendidikan> Chiquita Puspa Annisa Dewi, K. P. (2024, 02 27).

<https://umsu.ac.id/berita/bansos-pip-2024-syarat-dan-cara-pendaftaran/>

<https://puslapdik.dikdasmen.go.id/inilah-peserta-didik-yang-layak-menerima-dana-bantuan-pip/>

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar

(Kemendikbudristek, Persesjen, 2023) Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

Lampiran 1 Surat Pengantar Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sol Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225802 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2938 /FIS.0/01.10/IX/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 11 September 2025

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara

Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Erika Br Aruan
N P M : 228510014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pemerataan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Semadam"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP

Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Selliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2902/FIS.0/01.10/IX/2025
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

Medan, 20 September 2025

Kepada Yth,
Kepala Sekolah SD Negeri 1 Semadam

Di Tempat

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : ERIKA BR ARUAN
N P M : 228510014
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Sekolah SD Negeri 1 Simpang Semadam untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

"Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pemerataan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) di Kecamatan Semadam"

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Walid Musthafa S., S.Sos, M.I.P

- Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
 2. Mahasiswa ybs
 3. Arsip



Lampiran 2 Surat Selesai



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane-Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652
Website : Email :

SURAT KETERANGAN
Nomor : 420/ 50 /1.b /2025

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Kepada

Yth. Dekan Universitas Medan Area

Sehubungan dengan Surat Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nomor : 2738/FIS.0/01.10/IX/2025

Tanggal : 11 September 2025

Bahwa mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Medan Area yang Bernama:

Nama : Erika Br Aruan

NIM : 228510014

Telah **SELESAI** melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara” dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Pemerataan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar di Kecamatan Semadam”**

Demikian disampaikan untuk dapat di gunakan seperlunya, atas perhatiannya terimakasih.

Kutacane, 19 Desember 2025
KABID PEMBINAAN SD





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

SD NEGERI 1 SEMADAM

Desa Simpang Semadam, Kec.Semadam, Kab. Aceh Tenggara, Prov. Aceh

Email: sdsatusmadam@gmail.com

Nomor : 422/137/III.1/2026

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Kepada

Yth. Dekan Universitas Medan Area

Sehubungan dengan Surat Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nomor : 2902/FIS.0/01.10/IX/2025

Tanggal : 20 September 2025

Bahwa mahasiswa program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Medan Area yang Bernama:

Nama : Erika Br Aruan

NIM 228510014

Telah **SELESAI** melakukan penelitian di Sekolah SD NEGERI 1 SEMADAM dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Pemerataan Pendidikan Melalui Program Indonesia Pintar di Kecamatan Semadam"**

Demikian disampaikan untuk dapat di gunakan seperlunya, atas perhatiannya terimakasih.

di Medan, 15 Januari 2026
Kepala Sekolah

SNR Rasmah, S.Pd
NIP. 196704011991102001

Lampiran 3 Wawancara Peneliti

1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter (Informan Kunci)

Identitas diri

Nama : Tawardi, S.Pd

Jabatan : Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter

Alamat : Desa Kuta Lengt Silian Kec. Bukit Kusam , Kab. Aceh Tenggara

Tanggal lahir : 3 Desember 1980

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pertanyaa penelitian

1. Bagaimana langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyediakan sarana dan mendukung kelancaran dan Bagaimana mekanisme pengawasan Dinas terhadap penyaluran bantuan PIP agar tidak terjadi penyimpangan?
2. Apakah ada edukasi yang dilakukan Dinas agar Masyarakat memahami tujuan program PIP dan Sejauh mana program PIP berpengaruh terhadap peningkatan semangat belajar siswa menurut Dinas?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa tantangan terbesar daalam menjalankan program Indonesia pintar ini?

2. Kepala Sekolah SD N 1 Semadam (Informan Utama)

Identitas Diri

Nama : Sita Rasina S.Pd

Jabatan: Kepala Sekolah SD Negeri 1 Semadam

Alamat: Babel Baru, Kec. Bukit Kusam

Tanggal Lahir : 1 April 1967

Jenis Kelamin : Perempuan

Pertanyaan Wawancara

1. Apa peran sekolah dalam memastikan bantuan PIP sampai ke siswa yang benar-benar membutuhkan?
2. Apakah ada perubahan siswa setelah mendapatkan bantuan PIP?
3. Apa kendala yang dihadapi pihak sekola dalam Program Indonesia Pintar ini?

3. Masyarakat (Informan Tambahan)

Identitas Diri

Nama : Lena Warna Nambela

Jabatan: Masyarakat

Alamat: Desa Semadam, Kampung lama

Jenis Kelamin : Perempuan

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Anda merasa bantuan PIP sudah tepat sasaran dan membantu meringankan biaya pendidikan?
2. Bagaimana pandangan Anda tentang sosialisasi atau informasi yang diberikan sekolah/Dinas terkait pip?
3. Apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam peningkatan pemerataan pendidikan melalui program indonesia pintar?
4. Masyarakat (Informan Tambahan)

Identitas Diri

Nama : Elvita Marpaung

Jabatan: Masyarakat

Alamat: Desa Semadam, Kampung Baru

Jenis Kelamin : Perempuan

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Anda merasa bantuan PIP sudah tepat sasaran dan membantu meringankan biaya pendidikan?
2. Bagaimana pandangan Anda tentang sosialisasi atau informasi yang diberikan sekolah/Dinas terkait pip?
3. Apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam peningkatan pemerataan pendidikan melalui program indonesia pintar?
4. Masyarakat (Informan Tambahan)

Identitas Diri

Nama : Rasmi

Jabatan: Masyarakat

Alamat: Desa Semadam, Kampung Lama

Jenis Kelamin : Perempuan

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Anda merasa bantuan PIP sudah tepat sasaran dan membantu meringankan biaya pendidikan?
2. Bagaimana pandangan Anda tentang sosialisasi atau informasi yang diberikan sekolah/Dinas terkait pip?
3. Apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam peningkatan pemerataan pendidikan melalui program indonesia pintar?

Lampiran 4 Dokumentasi



Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Tawari S. Pd Selaku Kepala Seksi Peserta didik dan pengembangan Karakter

Gambar 1.2



Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Sita Rasinah S. Pd Selaku Kepala Sekolah Sd Negeri 1 Semadam.

Gambar 1.3



Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Lena Warna Nambela Selaku Orang Tua/Wali Siswa.

Gambar 1.4



Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Elvita Marpaung Selaku Orang Tua/Wali Siswa.

Gambar 1.5